Evaluasi Kebutuhan Fasilitas Tempat Pemberhentian Angkutan Perkotaan Di Kabupaten Ciamis

Oleh:

Rizki Abdul Bahtiar¹, Masrono Yugihartiman², Sulistyo Sutanto³

¹Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD

²Manajemen Transportasi Jalan

³Kementerian Perhubungan

⁴E-mail : rizkiabdul.ra10@gmail.com

Abstrak

Tempat pemberhentian angkutan umum memegang peran krusial dalam sistem transportasi perkotaan, baik dalam meningkatkan aksesibilitas maupun efisiensi pergerakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan kinerja tempat pemberhentian angkutan perkotaan di Kabupaten Ciamis, dengan fokus pada kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas bagi pengguna. Metode penelitian meliputi survei lapangan, serta analisis data sekunder dari lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti penempatan strategis, fasilitas pendukung, serta kebersihan dan keamanan sangat mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna. Penelitian ini menyarankan peningkatan infrastruktur dan manajemen tempat pemberhentian angkutan umum guna mendukung mobilitas yang lebih baik dan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis.

Kata Kunci: Angkutan Umum, Aksesibilitas, Efisiensi

PENDAHULUAN

Angkutan umum dari segi aksesibilitas memiliki fasilitas penunjang diantaranya terminal, tempat pemberhentian, dan jalan dari 3 fasilitas ini merupakan simpul transportasi yang sangat perlu diperhatikan. Fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya pada sektor sarana transportasi darat dalam kota yaitu angkutan perkotaan di wilayah Kabupaten Ciamis dan fasilitas penunjang yaitu tempat pemberhentian angkutan perkotaan agar memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan.

Angkutan kota mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan transportasi bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari – hari. Dalam pengoperasiannya, angkutan kota di Kabupaten Ciamis melayani 13 rute trayek yang sudah ditetapkan.

Fasilitas pemberhentian sangat dibutuhkan oleh angkutan umum yang berfungsi sebagai tempat menaik dan menurunkan penumpang karena berpengaruh pada kelancaran dan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Ciamis. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan evaluasi kebutuhan fasilitas tempat pemberhentian dari segi prasarana agar tempat pemberhentian yang sudah ada bisa ditambah fasilitas penunjang nya, dan lokasi kantong penumpang yang seharusnya terdapat fasilitas pemberhentian namun tetapi tidak ada bisa ditambahkan tempat pemberhentian di titik kantong penumpang tersebut agar sopir dan penumpang turun dari angkutan tidak di sembarang tempat. Salah satu contoh dari tempat pemberhentian angkutan perkotaan yang ada di Kabupaten Ciamis adalah Halte dan TPB dengan Rambu (Bus Stop), selain untuk menaik dan menurunkan penumpang, halte dan tpb juga merupakan titik kantong penumpang. Kabupaten Ciamis memiliki 19 halte dan 7 bus stop dengan rambu yang dilewati oleh trayek angkutan perkotaan.

Oleh sebab itu, perlu dilakukannya evaluasi dan identifikasi permasalahan terhadap fasilitas tempat pemberhentian angkutan umum agar dapat meningkatkan penggunaan angkutan umum apabila fasilitas tempat pemberhentian dalam kondisi yang nyaman, aman, dan tertib sesuai fungsinya (Bawana dan Rachmawati, 2020).

METODE

Berdasarkan data-data input yang ada, selanjutnya digunakan untuk menganalisa kebutuhan tempat pemberhentian angkutan perkotaan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berdasarkan titik kantong penumpang
- b. Berdasarkan tata guna lahan tempat pemberhentian penumpang.
- c. Jarak antar tempat pemberhentian penumpang.

Dari tahapan analisis maka dapat diusulkan kebutuhan tempat pemberhentian angkutan perkotaan dilihat dari aspek tata guna lahan, kantong-kantong penumpang, jarak antar tempat pemberhentian dan memudahkan akses pejalan kaki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kebutuhan tempat pemberhentian maka tiap segmennya dapat ditentukan usulan tempat pemberhentian dengan berdasarkan tata guna lahan dan kantong penumpang sesuai dengan standar SK. Dirjen Perhubungan Darat No. 271/HK.105/DRJD/96 yang terdiri dari halte dan TPB berupa rambu.

A. Berdasarkan titik kantong penumpang

Pada 13 trayek yang dilalui oleh angkutan perkotaan di Kabupaten Ciamis yang sudah dibagi menjadi beberapa segmen memiliki jumlah penumpang naik dan turun paling tinggi setiap trayeknya yaitu pada segmen Terminal Ciamis – Simpang 3 Gayam, Simpang 3 Gayam – Taman Lokasana, Simpang Tugu Adipura – Simpang Arah Cirebon, Jl. Re Martadinata – Simpang Maleber, Terminal Ciamis – Bundaran

Bmx, Terminal Ciamis – Jl. Mr. Iwa Kusuma Sumantri, maka pada segmen tersebut akan dibangun halte menyesuaikan dengan titik kantong penumpang dan dengan melihat kondisi tata guna lahannya, sedangkan pada segmen yang lain akan dibangun jenis tempat pemberhentian berupa TPB dengan rambu dengan melihat kondisi tata guna lahannya.

B. Berdasarkan tata guna lahan

Para calon penumpang yang menunggu angkutan umum cenderung berada pada kawasan kegiatan sekolah, pasar, pusat perbelanjaan, dan perkantoran. Pusat – pusat kegiatan dan persimpangan jalan sering menjadi lokasi naik-turun penumpang angkutan umum, hal ini terjadi karena letak tempat pemberhentian terlalu jauh dari persimpangan jalan maupun dari pusat kegiatan maka keberadaan tempat pemberhentian perlu dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kondisi ruas jalan maupun pusat kegiatan tersebut. Berikut merupakan tata guna lahan yang dilewati dan jarak standar dalam setiap segmennya.

Tabel 1 Jarak Standar Berdasarkan Tata Guna Lahan

Zona	Tata Guna Lahan	Lokasi	Jarak Tempat Henti (m)
1	Pusat kegiatan sangat padat: pasar, pertokoan.	CBD, Kota	200 – 300*
2	Padat: perkantoran, sekolah, jasa.	Kota	300 – 400
3	Permukiman	Kota	300 – 400
4	Campuran padat: perumahan, sekolah, jasa.	Pinggiran	300 – 500
5	Campuran jarang: perumahan, ladang sawah, tanah kosong	Pinggiran	500 – 1.000

Sumber: SK. Dirjen Perhubungan Darat No. 271/HK.105/DRJD/96

1. Trayek 1

Tabel 2 Tata Guna Lahan dan Jarak Standar Trayek 1

Trayek	Segmen	Tata Guna Lahan	Jarak Standar
1	Terminal Ciamis - Simpang 3 Gayam	Pasar, dan Pertokoan	200-300*
	Simpang 3 Gayam -Taman Lokasana	Pemukiman, Sekolah, dan Jasa	300-400
	Taman Lokasana -Simpang Tugu Adipura	Pemukiman, dan Pertokoan	300-500
	Simpang Tugu Adipura - Simpang Arah Cirebon	Perkantoran, Sekolah, Pertokoan, dan Jasa	200-300*
	Simpang Arah Cirebon - Simpang YPS	Pemukiman, dan Pertokoan	300-500
	Simpang YPS - Jl. Sukadana	Pemukiman, Sekolah, dan Jasa	300-500
	Jl. Sukadana - Jl. Jelat	Pemukiman, Jasa, dan Tanah kosong	500-1.000

Sumber: Hasil Analisis 2024

Pada trayek 1 memiliki tata guna lahan pada setiap segmennya seperti pemukiman, pertokoan, sekolah, dan tanah kosong.

Berikut ini merupakan contoh perhitungan kebutuhan tempat pemberhentian angkutan umum berdasarkan jarak antar tempat pemberhentian dan tata guna lahan.

a. Terminal Ciamis – Simpang 3 Gayam

Panjang Segmen = 850 meter

Tata Guna Lahan = Pasar, dan Pertokoan

Standar Tempat Henti = 200 – 300* meter

Jarak Minimal Dari Persimpangan = 100 meter

$$\begin{aligned}
 \text{Kebutuhan Ideal} &= \frac{\text{Panjang Segmen} - \text{Jarak minimal dari simpang}}{\text{Standar Tempat Henti} \times 2} \\
 &= \frac{850 \text{ meter} - 100 \text{ meter}}{300 \text{ meter} \times 2} \\
 &= 1,4 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Jadi kebutuhan ideal untuk tempat pemberhentian angkutan umum di segmen Terminal Ciamis – Simpang 3 Gayam adalah 1. Jumlah tersebut tetap disesuaikan dengan tata guna lahan disepanjang ruas jalan tersebut.

Perhitungan tersebut berlaku untuk semua segmen sehingga dapat diperoleh jumlah kebutuhan tempat pemberhentian.

Dari hasil tersebut dihasilkan usulan tempat pemberhentian berupa 6 halte dan 52 TPB dengan rambu untuk seluruh trayek angkutan perkotaan di Kabupaten Ciamis yang berjumlah 13 trayek.

KESIMPULAN

1. Setelah dilakukan analisis berdasarkan titik kantong penumpang dan tata guna lahan terdapat beberapa segmen yang masih membutuhkan tempat pemberhentian, jika dibandingkan dengan tempat pemberhentian eksisting masih kurang sehingga perlu adanya penambahan tempat pemberhentian untuk trayek angkutan perkotaan.
2. Jumlah tempat pemberhentian yang dibutuhkan sebanyak 58 tempat pemberhentian yang terdiri dari 6 halte, dan 52 tempat pemberhentian bus dengan rambu sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Bawana, A., & Rini, R. (2020). EVALUASI LOKASI EKSISTING HALTE BUS RAPID TRANSIT TRANS JOGJA. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 07, 1-12.

PEDOMAN TEKNIS PEREKAYASAAN TEMPAT PERHENTIAN KENDARAAN KENDARAAN UMUM. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NO.271/HK.105.DRDJ/96. (1996).